

**ASPEK SUMBERDAYA FISIK, SOSIAL MASYARAKAT
DAN EKONOMI DALAM PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN KARO**

Oleh :

Mardiana, S.E



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
M E D A N
2 0 0 2**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatNya, sehingga penulisan hasil kajian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hasil kajian yang berjudul "Aspek Sumberdaya Fisik, Sosial Masyarakat dan Ekonomi dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karo" ini, mengkaji tentang perubahan fungsi lahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan serta perekonomian Kabupaten Karo sebagai faktor yang mempengaruhi penataan ruang dan sekaligus yang mendapatkan dampaknya. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta masyarakat luas secara umum.

Disadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu diharapkan para pembaca mau secara ikhlas memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan kajian-kajian di kemudian hari.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu, yang namanya tidak tercantum dalam tulisan, semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Ammin.

Medan, Desember 2002

Penulis

Mardiana, S.E

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Studi	3
1.3 Manfaat Studi	3
1.4 Ruang Lingkup Studi	3
II PENATAAN RUANG WILAYAH	5
2.1 Definisi Kota	5
2.2 Fungsi dan Peranan Kota	7
2.3 Perencanaan Wilayah	8
2.4 Alih Fungsi Lahan	10
2.5 Pengembangan Wilayah	11
III SUMBERDAYA FISIK KABUPATEN KARO	13
3.1 Keadaan Umum	13
3.2 Tanah dan Tata Guna Lahan	17
3.3 Neraca Sumberdaya Alam	21
IV SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN KARO	24
4.1 Keperndudukan	24
4.2 Ketenagakerjaan	27
4.3 Pendidikan	28
4.4 Tingkat Kesejahteraan Penduduk	29
4.5 Adat Istiadat	30
V PEREKONOMIAN KABUPATEN KARO	34
5.1 Tinjauan Terhadap Perekonomian Sumatera Utara	35
5.2 Struktur PDRB Kabupaten Karo	38
5.3 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	40
5.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	42
VI KESIMPULAN	45
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan tata ruang jangka panjang sangat rumit karena melibatkan banyak pihak yaitu pemilik tanah, pemakai tanah, pengguna usaha tanah, sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung serta pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini melibatkan banyak instansi yang mempunyai wewenang dalam pemanfaatan tanah dan penataan ruang kota. Seperti, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, serta beberapa dinas teknis antara lain Dinas Pertanian, Tata Kota dan Tata Bangunan, Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda.

Ragam kompleksitas dan kepentingan di atas, pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, mobilitas/pergerakan dan kecenderungan perkembangan secara harmonis dan saling mendukung satu sama lain dalam suatu tata ruang.

Kewenangan dan tugas pemerintah tersebut telah ditegaskan dalam beberapa peraturan seperti, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1953, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976, dan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1986, No. 48 Tahun 1983, dan No.79 Tahun 1985 serta Undang-undang No.24 Tahun 1992, yang kesemuanya mengatur tentang Tata Ruang.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan yang serasi dan terpadu. Mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk itu diarahkan agar pembangunan daerah langsung secara berdayaguna dan berhasil guna di setiap kawasan, serta tingkatan administrasi pada pemerintah kota termasuk kecamatan.

Pada tingkat tertinggi perencanaan tata ruang dilakukan dalam ruang lingkup nasional atas dasar tinjauan pemanfaatan ruang secara makro. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP), yang mengandung rumusan bagian-bagian wilayah.

Hingga saat ini Kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota (RUTRK) secara terpadu, yang merupakan rincian dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Rencana Umum Tata Ruang tersebut merupakan kebijaksanaan pemerintah kabupaten/kota yang menetapkan kebijaksanaan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi. Yaitu lokasi pengembangan kawasan budidaya, kawasan produksi, kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sehubungan dengan itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo merupakan jabaran tata ruang dari pola dasar pembangunan Wilayah. Rencana Tata Ruang Kabupaten juga berupa rumusan atas dasar penilaian umum wilayah pengembangan kota yang hasil akhirnya dilanjutkan pada tahap penyusunan program pembangunan sektoral, dalam jangka panjang dan menengah.

Penetapan Kabupaten Karo sebagai daerah pertanian dan konservasi telah mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan yang ada dari lahan-lahan hutan lindung menjadi pertanian dan konservasi. Aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bagian wilayah kabupaten juga menyebabkan peningkatan permintaan lahan yang semakin besar di kabupaten ini.

Perkembangan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menunjukkan penurunan luas lahan hutan di Kabupaten Karo. Perubahan fungsi lahan tersebut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kabupaten ini dan mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Perubahan yang terjadi meliputi

kepadatan penduduk, mata pencaharian, pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan.

Sampai saat ini masih kurang kajian pengaruh penataan ruang wilayah kabupaten terhadap perubahan penggunaan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan menelaah persoalan di atas sebagai perbandingan bagi penetapan suatu rencana tata ruang.

1.2 Tujuan Kajian

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk :

1. Mengenali pemanfaatan sumberdaya fisik wilayah akibat penataan ruang wilayah Kabupaten Karo terhadap.
2. Mengenali kehidupan sosial masyarakat akibat penataan ruang wilayah Kabupaten Karo.
3. Mengenali perekonomian masyarakat akibat penataan ruang wilayah Kabupaten Karo.

1.3 Manfaat Kajian

Hasil dari kajian ini diharapkan nantinya akan berguna:

1. Bagi pemerintah, khususnya Bappeda Kabupaten Karo sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan ekonomi di daerah ini.
2. Bagi pengembangan pengetahuan, sebagai tambahan referensi untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan tata ruang dan perencanaan ekonomi wilayah.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Karo. Pemilihan ini berdasarkan pada besarnya perubahan penggunaan lahan dan tumbuhnya kawasan pertanian baru dan kegiatan perekonomian di kawasan konservasi. Rencana tata ruang wilayah

BAB II

PENATAAN RUANG WILAYAH

2.1 Definisi Kota

Kota sebagai satu kesatuan administrasi diartikan sebagai *City* sedangkan daerah perkotaan diidentikkan dengan *Urban* yakni suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern atau mempunyai ciri-ciri kota. Secara khusus Dickinson memberikan pengertian kota adalah sebuah pemukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan pertanian (Jayadinata, 1992).

Pamudji (1979) menyatakan ada berbagai pendekatan di dalam menelaah pengertian kota yaitu : pendekatan geografis, ekonomi, sosiologis. Masyarakat perkotaan bersifat rasional, impersonal dan tidak intim, sedangkan pada masyarakat kelurahan sebaliknya. Lapangan pekerjaan masyarakat kota lebih banyak macamnya jika dibandingkan dengan masyarakat di kelurahan.

Kamus *The Contemporary English Indonesia Dictionary* (Salim, 1989) menyatakan metropolitan berarti terdiri dari kota-kota besar dan daerah sekitarnya. Berdasarkan pengertian kata-kata tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ada ketarkaitan antara satu kota besar dengan daerah sekelilingnya, terutama untuk perencanaan kota. Dalam merencanakan suatu kota besar, ahli perencana kota tidak dapat hanya melihat batas administrasi kota saja, karena kagiatan kota itu berkaitan erat dengan daerah sekitarnya, yang dikatakan sebagai wilayah perencanaan kota.

Sebagaimana menurut Stuart, 1979 (dalam Hermansur, 1996) wilayah perencanaan kota itu akan mencakup suatu pusat kegiatan perkotaan dengan tujuan perencanaan tertentu, bersama dengan wilayah terbangun sekitarnya langsung berbatasan ataupun tidak langsung, termasuk wilayah yang belum terbangun yang

diperkirakan akan terlibat dalam kegiatan pembangunan selama waktu perencanaan misalnya 20 sampai 25 tahun.

Menurut Berry dan Haston (dalam Sukardi, 1992), wilayah metropolitan adalah suatu wilayah yang harus mencakup dua elemen pokok, yakni :

1. Ada satu atau beberapa kota yang merupakan kota/daerah inti dengan batasan jumlah dan kepadatan tertentu.
2. Ada hubungan sosial-ekonomi antara kota/daerah inti terdekat dengan daerah yang berdekatan yang memenuhi ciri-ciri metropolitan.

Haston dan Berry (dalam Sukardi, 1992) mengemukakan kepentingan perencanaan kota, pemerintah Federal Amerika Serikat membuat suatu batasan yang dinamakan SMSA (Standard Metropolitan Statistical Area) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebuah SMSA harus mencakup paling kurang sebuah kota inti dengan penduduknya minimal 50.000 jiwa bersatu dengan wilayah sekitarnya.
2. Wilayah sekitar dianggap masuk ke dalam suatu kawasan metropolitan apabila 75 % dari tenaga kerja bekerja pada sektor bukan agraris.
3. Minimal 30 % tenaga kerja di luar kota inti bekerja di kota inti (penglaju).

Jumlah penglaju sebesar 30 % ini adalah angka minimal, sebagai persyaratan bahwa suatu kota satelit merupakan bagian dari sistem kota inti. Semakin besar angka tersebut maka semakin tinggi pula ketergantungan kepada kota inti, yang juga berarti semakin banyak memberikan dampak kepada kota inti (Sukardi, 1992).

Di Indonesia belum ada kriteria yang jelas tentang kota metropolitan, kecuali yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa kota metropolitan adalah kota yang berpenduduk di atas satu juta jiwa.

2.2 Fungsi dan Peranan kota

Secara umum kota merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya. Hal ini berarti kota merupakan pusat aktivitas kehidupan masyarakat, yang oleh departemen dalam negeri dikatakan mempunyai fungsi (Depdagri, 1981) :

1. Pusat pemukiman yang dalam proses kehidupannya selalu berubah-ubah selaras dengan faktor perkembangannya.
2. Pusat kegiatan penduduk yang menempatkan kedudukan sebagai pusat pemasaran dan pelayanan peningkatan produksi dari kegiatan ekonomi maupun pelayanan sosial, politik dan budaya.
3. Pusat penyediaan fasilitas penunjang pertumbuhan dan daerah belakangnya dalam hal ini kota dapat merupakan terminal jasa distribusi.
4. Pusat pendorong dalam proses pembangunan daerah dan nasional.

Apabila ditinjau dari sifatnya maka fungsi kota tersebut di atas dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi yang sifatnya memberikan pelayanan ke dalam yaitu fungsi internal. Fungsi ini adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi segala tuntutan hidup warganya seperti penyediaan sarana kegiatan, tempat perumahan, fasilitas sosial seperti sekolah, pusat kesehatan, dan transportasi dari rumah ke tempat kerja serta kebutuhan lainnya.
2. Fungsi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat regional (fungsi eksternal), yaitu fungsi yang bersifat menunjang dan mendorong pembangunan daerah atau wilayah pengaruhnya. Dalam hal ini kota harus berfungsi sebagai (Depdagri, 1981) :
 - a. Pusat pemasaran bagi bermacam-macam barang yang dihasilkan dari usaha dan kegiatan-kegiatan masyarakat dan mengolah potensi alam. Oleh karena itu setiap kegiatan produksi baik itu bersifat pertanian maupun industri akan berorientasi kepada pasar.

- b. Untuk menghubungkan pusat produksi dan pusat pasar, maka suatu kota harus dapat memberikan pelayanan jasa distribusi yang meliputi segai angkutan dan perdagangan. Dalam hal ini kota disebut juga terminal jasa distribusi, jadi suatu produksi untuk dapat menjangkau pasaran yang seluas-luasnya harus dilayani oleh jasa distribusi yang baik, yang secara fisik berbentuk jaringan jalan, fasilitas angkutan terminal, fasilitas pasar dan lain-lain.
- c. Untuk memberikan pelayanan dan fasilitas ekonomi sesuai dengan fungsinya yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan produksi seperti penyediaan bibit, pupuk dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian.
- d. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa ekonomi lainnya, seperti fasilitas perbankan, komunikasi dan lainnya yang diperlukan untuk mendorong terciptanya kegiatan usaha dalam masyarakat baik itu warga kota maupun warga sekitarnya.
- e. Pusat pendorong modernisasi dan perubahan-perubahan dalam bentuk fasilitas ilmu pengetahuan, penelitian, penerangan, penyuluhan dan sebagainya.
- f. Pusat pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan administrasi pemerintahan yang membenkan pelayanan untuk wilayah jangkauannya.

Peranan kota diartikan sebagai kemampuan kota yang bersangkutan sebagai pendorong bagi pengembangan daerah yang berada di dalam wilayah pengembangannya. Hal ini berarti bahwa kota berfungsi sebagai pusat pengembangan (Depdagri, 1981).

2.3 Perencanaan Wilayah

Konsekuensi dari perkembangan fungsi dan peranan kota diperlukan kemampuan mengantisipasi bagaimana mengalokasikan ruang bagi penyelenggaraan

fungsi-fungsi tersebut. Berkaitan dengan itu, diperlukan pembinaan dan pengarahan bagi pengembangan dan pertumbuhan kota yang berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kota merupakan kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan atau peninjauan kembali rencana kota, dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan, berazaskan kelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Dirjen Bangda, 1989).

Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi, wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Perencanaan kota mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota sehingga suasana aman, tertib, lancar, sehat dapat diciptakan. Maksudnya tersedianya rencana kota yang mantap yang mengikat serta memperhatikan aspirasi dari warga kota (Dirjen Bangda, 1989).

Dalam pelaksanaannya rencana kota terdiri dari : (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan (3) Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). RUTRK merupakan rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan kota dalam jangka panjang. RUTRK ini mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup dan terikat dengan batas administrasi kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyajikan perwujudan ruang rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. RDTRK ini mempunyai

wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atau seluruh wilayah kota dan dapat terdiri dari satu atau beberapa buah kawasan.

Menurut Dirjen Bangda (1989) RTRK merupakan rencana geometri pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk pewujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota. RTRK ini mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atau seluruh kawasan tertentu.

2.4 Alih Fungsi Lahan

Menurut Anwar (1993) lahan merupakan sumberdaya alam yang penting dalam menopang setiap aktivitas kehidupan manusia sebagai sumberdaya yang dapat diolah dan sebagai tempat tinggal.

Barlowe (dalam Hermansyur 1996) menyebutkan sumberdaya tanah merupakan suatu masalah ekonomi yang penting apabila penduduk mulai menggunakannya. Dalam masyarakat modern sumberdaya tanah memberikan penghasilan terbesar bila digunakan untuk industri dan perdagangan, prioritas berikutnya untuk pemukiman.

Sitorus (dalam Fawzia, 1999) menyatakan keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan akan memberikan keuntungan atau kerugian besar secara ekonomis dan lingkungan. Nasution (1995) berpendapat penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan instrumen pengendali tanah yang sangat penting.

Anwar (1993) mengemukakan dampak kemajuan ekonomi dari wilayah mengalami banyak pengalihan fungsi lahan sawah adalah membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan upah masyarakat.

Fawzia (1999) menemukan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tarjung Morawa membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat

sekitarnya. Lahan-lahan pertanian yang ada diubah menjadi fungsi ekonomi seperti industri dan perumahan.

2.5 Pengembangan Wilayah

Hanafiah (1982) menyatakan wilayah merupakan susunan unit tata ruang yang terdiri dari jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala. Konsep tata ruang erat kaitannya dengan struktur kebudayaan pada suatu waktu tertentu.

Hartshome (dalam Hanafiah, 1982) memformulasikan pengertian wilayah sebagai berikut : "Suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek tertentu berbeda dengan area lain". Unit area ini adalah merupakan objek yang konkrit dengan karakteristik yang unik. Struktur wilayah akan mempunyai watak dari pada "mosaik" dari tiap-tiap bagian yang mempunyai kesamaan.

Sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang tentang tata ruang bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat 1 UU No. 24/1992).

Purnomosidi (dalam Jayadinata, 1992) menyebutkan peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa pengembangan pada wilayah yang bersangkutan. Maka keseluruhan usaha yang menjurus pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, dapat dipandang sebagai penyebab berlangsungnya proses berkembangnya wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah adalah pembangunan wilayah itu sendiri dalam arti bahwa kondisi wilayah menjadi lebih baik di segala sektor yang meliputi sektor jasa, industri dan pertanian dari segi paling tidak pengolahan hasil pertanian dan di segi penerimaan masyarakat atau pada segi pengeluaran konsumsi, investasi serta ekspor-impornya (Anwar, 1993).

Pengertian pengembangan wilayah menurut Sandy (1982) pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut serta tetap mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Hadjisaroso (1994) pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Jayadinata (1992) mengemukakan pengembangan wilayah adalah memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada.

Sasaran Pembangunan daerah harus diterjemahkan dari tujuan pembangunan nasional. Dimana tujuan pembangunan daerah harus konsisten dengan tujuan nasional yang umumnya terdiri atas (Arsyad, 1995):

- a. Mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat
- b. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup.
- c. Pemerataan pendapatan.
- d. Mengurangi perbedaan antara tingkat pendapatan, kemakmuran, pembangunan serta kemampuan antar daerah.
- e. Membangun struktur perekonomian agar tidak berat sebelah.

BAB III

SUMBERDAYA FISIK KABUPATEN KARO

3.1 Keadaan Umum

Kabupaten Karo merupakan salah satu dari 19 daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara yang terletak di daerah pegunungan Bukit Barisan. Secara geografis daerah ini berada pada posisi : $02^{\circ}52'04''$ Lintang Utara di Bagian Selatan, $03^{\circ}19'52''$ Lintang Utara di Bagian Utara, $97^{\circ}37'48''$ Bujur Timur di Bagian Barat, dan $98^{\circ}38''$ Bujur Timur di Bagian Timur.

Wilayah ini terbentang mulai dari bagian tengah Propinsi Sumatera Utara pada bagian timur, sampai dengan perbatasan bagian tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bagian barat. Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung merupakan dua puncak gunung tertinggi yang letaknya berada di bagian Utara wilayah Kabupaten Karo. Kedua gunung tersebut dihubungkan oleh pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari Timur sampai ke arah Barat. Keadaan tersebut mengakibatkan kondisi wilayah Kabupaten Karo menurun dari arah Utara ke arah Selatan dan dari arah Timur ke arah Barat.

Luas Kabupaten Karo berkisar 212.725 Ha, atau 2,97% dari luas daratan Propinsi Sumatera Utara, 7.168.068 Ha. Secara administratif, luasan ini terbagi ke dalam 13 kecamatan atau 248 desa dan 10 kelurahan lihat, dengan batas sebagai berikut : sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang, Simalungun dan Toba Samosir, sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Nanggroe Aceh Darussalam), sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Dairi.

Tabel 1 : Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Proporsi (%)
1	Mardingding	26.711	12,56
2	Laubaleng	25.260	11,87
3	Tigabinanga	16.038	7,54
4	Juhar	21.856	10,27
5	Munte	12.564	5,91
6	Kutabuluh	19.570	9,20
7	Payung	13.400	6,30
8	Simpang Empat	22.547	10,60
9	Kabanjahe	4.465	2,10
10	Berastagi	3.050	1,43
11	Tigapanah	21.909	10,30
12	Merek	12.551	5,90
13	Barusjahe	12.804	6,02
Jumlah		212.725	100,00

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2001

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah (kelerengan). Untuk itu kemiringan lereng tanah perlu diketahui. Untuk melihat berbagai kemungkinan budi daya yang akan dikembangkan. Dengan konfigurasi letak ketinggian antara 140 m s/d lebih dari 1000 m. Wilayah kabupaten karo dikenal dengan bentuk Landskap yang berbukit-bukit dan bergelombang. Wilayah Kabupaten Karo memiliki bentuk kemiringan lereng dari datar, miring s/d yang terjal. Jadi Kabupaten Karo mempunyai topografi yang bervariasi dari kondisi bergunung dan berbukit karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan dan kondisi datar sampai dengan landai.

Bentangan landskap wilayah Kabupaten Karo adalah kesatuan dataran tinggi yang relatif luas dikelilingi kawasan perbukitan dan pegunungan yang bergelombang baik di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Landskap dimaksud ditandai oleh beberapa gunung dan puncak bukit yaitu Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Mbelin, Puncak Dolok Kem, Dolok Mulas, Dolok Sibuatan, Dolok Barus & Dolok Milmil.

Tempat tanah diatas permukaan laut perlu diketahui untuk melihat beberapa kemungkinan budidaya yang akan dikembangkan. Sebagian besar wilayah

Kabupaten Karo terletak pada ketinggian lebih dari 500 m dpl. Hanya 13,6% dari luas wilayah atau 28.879 Ha terletak dikelilinginya di bawah 500 m dpl. Lainnya 59.355 Ha atau 27,7% terletak antara 500 m s/d 1.000 m dpl dan 124.491 Ha atau 58,5% terletak di atas 1000 m dpl.

Dari hasil kajian menyebutkan budidaya pertanian hanya baik dilakukan di tanah dengan ketinggian tempat kurang dari 1.000 m dpl. Walaupun dikebanyakan kawasan dataran tinggi seperti di Kabupaten Karo berbagai budidaya non-sawah cukup berkembang. Menjadi pertimbangan bahwa pada ketinggian di atas lebih dari 1.000 m dpl potensial bagi terjadinya pengikisan karena ditemukan banyak tanah-tanah dengan kemiringan lebih dari 40 %.

Wilayah Kabupaten Karo terbentang dari tepi batas Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan bagian tengah Propinsi Sumatera Utara pada kawasan pegunungan Bukit Barisan sehingga wilayah ini memiliki ketinggian dari 120 m diatas Permukaan Laut (dpl) sampai dengan 1600 m diatas Permukaan laut.

Unsur iklim terdiri dari curah hujan, suhu (temperatur), kelembaban, angin dan penyinaran matahari. Dalam kaitan penyusunan tata ruang ini terutama dalam penentuan kawasan yang berfungsi lindung dan budidaya diperlukan data-data iklim terutama curah hujan. Data curah hujan di daerah studi cukup tersedia, sedangkan data suhu dan kelembaban sangat kurang, sehingga diperlukan pendugaan dengan mempertimbangkan korelasi antara ketinggian dari permukaan laut.

Rata-rata curah hujan bulanan Kabupaten Karo selama kurun waktu 1986 – 2001 adalah sebesar 1222,09 mm dengan 124,87 hari hujan dan hujan tahunan tertinggi 2634,65 mm terdapat di Berastagi yakni 2364,65 mm per tahun atau 146,33 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah terdapat di Stasiun Pancur Jaya, 1.063,88 mm dan 114,34 hari hujan per tahun. Musim kemarau di daerah Kabupaten Karo adalah sekitar bulan Juni sampai Agustus dan musim penghujan berlangsung pada bulan September sampai bulan Mei (BMG Medan, 2000). Sedangkan hari hujan bulanan diperoleh sekitar 10,41 hari. Sehingga dari data ini dapat diketahui tingkat

intensitas hujan terhadap pengrusakan agregat-agregat struktur tanah. Intensitas hujan semakin penting bila dihubungkan dengan kelas kelerengan dan jenis tanah pada lokasi-lokasi wilayah tertentu. Penentuan ini sangat membantu dalam menentukan suatu lahan kedalam penentuan penggolongan kawasan lindung atau budidaya.

Menurut ketinggian, daerah Karo terdiri atas iklim tropis pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut, sub tropis pada ketinggian 500 - 1000 meter dan iklim dingin pada ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Rata-rata temperatur udara di Kabupaten Karo sebesar $19,8^{\circ}\text{C}$ dengan suhu maksimum $25,8^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $14,3^{\circ}\text{C}$. Kelembaban rata-rata 96,2% dengan nilai kelembaban maksimum pada sore hari (pukul 18.00 WIB) dan kelembaban terendah pada pagi hari (pukul 07.00 WIB).

Formasi geologi Kabupaten Karo terdiri dari : Aluvium, Kalksteen, Innaleform, Permeo Carbon, Andesit Effusiva, Neogen Piegen Miocene dan Pogene Oligo dan Logene. Yang terluas adalah Liparit Effusiva, Piogene Lige dan Lhogene, Perme Carbon dan Andesit Effusiva. Lainnya dalam jumlah luas terbatas seperti : Aluvium hanya terdapat di Kecamatan Mardinding; Andesit Basalt hanya di kecamatan Tigapanah dan Merek, dan Niogene Piegen Miosene hanya terdapat di kecamatan Simpang Empat.

Secara fisiografi daerah Kabupaten Karo terbagi menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Tanah tinggi (high land) Berastagi, menurun dan memanjang sanipai 15 Km kearah Selatan, tertutup oleh bahan asal gunung api mencapai ketinggian maksimum 2.451 meter di atas permukaan laut (Gunung Sinabung).
2. Dataran tinggi Kabanjahe, menurun ke arah Barat, dengan ketinggian 600 meter sampai 1300 meter diatas permukaan laut. Daerah ini dibatasi oleh 2 pegunungan yang tinggi dengan lembah yang ditutupi oleh tufa.
3. Jalur Bukit Barisan bagian Timur, yang mencapai daerah bagian Baratdaya, ditutupi oleh meta batupasir

3.2 Tanah dan Tata Guna Lahan

Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis vegetasi di atasnya, dan merupakan wadah dari segala bentuk aktivitas manusia dalam kehidupannya. Sejalan dengan semakin besarnya pemenuhan kebutuhan manusia dan semakin terbatasnya lahan, diperlukan pengaturan yang seksama agar pemanfaatan sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Tanah-tanah ini dapat dikelompokkan ke dalam sistem klasifikasi, tetapi dalam penyusunan Tata Ruang ini, diakomodir dalam sistem Klasifikasi Tanah Nasional Indonesia.

Wilayah Kabupaten Karo secara garis besar dapat dibedakan ke dalam penggolongan jenis tanah, yakni: Aluvial, Kompleks Latosol Podsolik Merah Kuning dan Litosol, Organosol dan Glei Humus, Regosol, Andosol, Latosol, Podsolik Coklat Kelabu, Kompleks Podsolik Podsol, Regosol dan Litosol, Latosol, Regosol dan Podsol.

Penggunaan lahan di Kabupaten Karo dibedakan atas: permukiman, sawah, kebun campuran, perkebunan rakyat, ladang/tegalan, hutan belukar, semak dan alang-alang, tambak/kolam/empang, dan rawa. Penggunaan terluas yakni hutan (72.514 Ha) dan ladang/huma (59.155 Ha).

Areal hutan tersebar secara luas di wilayah Kecamatan Laubalang, Mardinding, Juhar, Kutabuluh, Simpang Empat, dan Tigapanah. Hutan di Wilayah Karo Tropik, sebagian dari kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan Cagar Alam dan merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Alam Hayati dan Ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Hutan ini merupakan hutan yang heterogen dengan berbagai jenis tanah yang ditumbuhinya. Tanah-tanah ini termasuk kedalam kelompok jenis tanah podsolik, latosol, litosol yang peka terhadap erosi. Sedangkan tanah rawa terdapat di wilayah Kecamatan Mardinding, Simpang Empat, dan Tigapanah.

Pertanian

Selama periode tahun 1996 – 2001 luasan lahan basah lahan kering untuk pertanaman padi dan palawija mempunyai kecenderungan perubahan yang tidak beraturan, kondisi ini dapat dilihat pada tabel Tabel 2 dan Tabel 3 sedangkan pada lahan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan mempunyai kecenderungan luasan semakin bertambah dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 1997 kondisi penurunan ini mungkin disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi dan moneter.

Pada tanaman sayuran mempunyai variasi yang berbeda selain ditahun 1997 mengalami penurunan juga terjadi pada tahun 1998 dan 2001.

Tabel 2 : Perkembangan Luas Tanaman Pangan Lahan Basah dan Lahan Kering (Ha)

No.	Tahun	Lahan Basah		Lahan Kering	
		Luas	Perubahan	Luas	Perubahan
1	1996	15,205	-	10,416	-
2	1997	17,273	2,068	12,026	1,610
3	1998	18,167	894	12,906	880
4	1999	15,238	-2,929	11,780	-1,126
5	2000	14,586	-652	12,448	668
6	2001	13,677	-909	7,898	-4,550

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Tabel 3 : Perkembangan Luas Tanaman Palawija (Ha) Per Komoditi Kabupaten Karo, Tahun 1996 – 2001

No	Jenis	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Jagung	68.583	71.290	61.038	68.337	61.425	53.036
2	Kacang Tanah	889	813	838	601	658	432
3	Kacang Kedelai	592	463	451	136	70	2
4	Kacang Hijau	131	302	71	125	200	73
5	Ketela Rambat	392	590	909	816	579	570
6	Ketela Pohon	2	6	6	21	12	9
Jumlah		70.589	73.464	70.036	62.944	54.082	
Per.		-	2.875	- 8.151	4.723	-7.092	-8.862

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Tabel 4 : Perkembangan Luas Tanaman Sayur-sayuran (Ha) Per Komoditi Kabupaten Karo, Tahun 1996 – 2001

No	Jenis Komoditi	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Bawang Merah	886	956	875	680	440	439
2	Bawang Putih	471	149	57	15	19	5
3	Bawang Daun	1.361	1.250	1.132	1.177	1.336	1.142
4	Kentang	10.828	9.629	6.583	8.114	7.740	5.107
5	Kol/Kubis	6.299	5.653	4.006	4.575	6.184	5.121
6	Petsoy/Sawi	3.638	3.073	2.050	2.768	3.255	3.104
7	Wartel	1.773	2.166	1.659	2.392	2.825	3.002
8	Cabe	7.394	7.165	5.388	6.503	7.314	5.868
9	Tomat	3.983	3.689	2.768	2.966	3.351	3.122
10	Buncis	3.406	3.123	2.394	2.583	3.168	3.409
	Jumlah	40.039	36.853	26.915	31.773	35.632	30.319
	Pertambahan		-3.186	-9.938	4.858	3.859	-5.313

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Tabel 5 : Perkembangan Luas Tanaman Buah-buahan (Ha) Per Komoditi Kabupaten Karo, Tahun 1996 – 2001

No	Komoditi	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Alpukat	63	-	27	-	23	29
2	Jambu Biji	42	22	18	8	9	9
3	Mangga	117	99	94	101	101	101
4	Pisang	420	103	101	-	211	628
5	Durian	118	142	172	172	156	171
6	Maskisah	2.078	1.037	1.268	1.068	573	732
7	Nenas	37	6	7	7	71	253
8	Pepaya	12	10	9	10	1	2
9	Jeruk	1.832	-	5.180	5.730	6.651	6.938
10	Sawo	18	61	52	-	75	74
	Jumlah	4.737	1.481	6.927	7.096	7.871	8.938
	Pertambahan		-3.256	5.446	168	775	1.067

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Secara umum luas lahan tanaman perkebunan/keras di Kabupaten Karo selama periode tahun 1996 - 2001 mengalami pertambahan, masing-masing komoditi dimaksud kemiri, kopi kelapa dan lain-lain, untuk lebih jelasnya lihat Tabel 6.

Tabel 6 : Perkembangan Luas Tanaman Keras (Ha) Per Komoditi Kabupaten Karo, Tahun 1996 – 2001

No	Jenis Komoditi	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Cengkeh	698	489	545	451	451	529
2	Kemiri	3.972	4.092	5.307	5.242	5.261	5.493
3	Kopi	3.296	3.347	3.555	3.883	4.217	4.530
4	Kelapa	1.078	1.324	1.586	1.344	1.345	1.343
5	Coklat	172	233	294	434	504	492
6	Kulit Manis	606	820	752	780	780	849
7	Tembakau Rakyat	357	157	145	125	125	485
8	Vanili	1.669	1.282	283	130	62	54
9	Kelapa Sawit	-	510	600	926	1.000	1.220
10	Aren	-	812	451	812	812	787
11	Karet	-	60	65	65	65	65
12	Tebu Rakyat	37	37	25	4	6	0
13	Lada	-	1	1	5	-	0
Jumlah		11.885	13.164	13.409	14.201	14.628	15.846
Pertambahan			1.280	245	792	427	1.218

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Karo berdasarkan TGHK terdiri dari hutan lindung 986.644,5 Ha, hutan suaka alam 7 Ha, hutan produksi terbatas 11.293 Ha, hutan produksi tetap 15.572 Ha (lihat Tabel 7).

Tabel 7 : Kawasan Hutan Menurut TGHK (Ha)

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan lindung	98.644,5
2.	Suaka alam	7
3.	Hutan produksi terbatas	11.293
4.	Hutan produksi tetap	15.572
5.	Hutan konversi	-
Jumlah		125.516,5

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Karo, 2001

Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang berada di atasnya terutama hutan akan memberikan persediaan air, konservasi tanah dan hasil hutan lainnya. secara umum kawasan hutan semakin berkurang sebagai akibat daripada aktivitas kehidupan manusia baik itu yang dimanfaatkan sebagai

tempat budidaya tanaman bahkan eksploitasi hasil-hasil hutan kecenderungan ini perlu diantisipasi sejak dini guna menghindari terjadinya bencana alam dan malapetaka bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi terutama di daerah sekitarnya

3.3 Neraca Sumber Daya Alam

Masyarakat Kabupaten Karo lebih akrab dengan lingkungan alamnya. Potensi sumber daya alam sampai saat ini lebih menentukan untuk sebagian besar masyarakat ketimbang upaya teknologi. Dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan khususnya dalam hal pemanfaatan ruang harus diupayakan keseimbangan dalam penggunaannya, sehingga kelestarian sumber daya alam tersebut dapat terjamin, demi kelangsungan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

Pada tahun 1996 tanah di Kabupaten Karo digunakan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan seluas 21.075 Ha. Penggunaan tanah untuk persawahan hampir di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Berastagi, sedangkan penggunaan yang terbesar merupakan kawasan hutan, dan kemudian diikuti penggunaan perkebunan rakyat. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang ada ternyata penggunaan tanah tersebut diatas pada tahun-tahun berikutnya telah mengalami pergeseran penggunaan tetapi data yang secara rinci dan melembaga belum tersedia.

Ketersediaan air di Kabupaten Karo relatif cukup namun perlu pengelolaan yang lebih berhati-hati agar masalah kekurangan air tidak akan terjadi. Pemanfaatan sumber air ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif khususnya pada lokasi-lokasi yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi (perkotaan), pada kawasan ini pemikim selain menggunakan sumber air permukaan kerap kali telah menggunakan sumber alternatif lain seperti pembuatan sumur bor. Bila kondisi ini terus dibiarkan dan tidak diberikan perhatian khususnya oleh Pemerintah Kabupaten maka dimungkinkan akan semakin mengurangi daya dukung lahan terhadap kehidupan yang ada diatasnya. Pemanfaatan sumber daya air ini selain untuk

konsumsi rumah tangga terutama air minum dan MCK juga penting untuk bahan pelarut zat-zat hara yang dibutuhkan oleh vegetasi sehingga pemanfaatan ini menjadi sangat strategis agar jangan sampai terjadi penurunan kualitas air karena selain dimanfaatkan di kawasan hulu (Kabupaten Karo) juga akan dimanfaatkan pada kawasan hilirnya (Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan).

Proses pembangunan dan dinamika yang berkembang di masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup telah memaksa perubahan penggunaan fungsi hutan, baik sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan cagar alam kedalam penggunaan yang lain. Perambahan hutan oleh masyarakat baik yang ditujukan untuk perluasan areal produksi, pemenuhan kebutuhan kayu bakar (energi) telah ikut serta mempengaruhi keseimbangan hutan.

Salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang adalah kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup merupakan faktor yang menentukan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas manusia, baik aktivitas perekonomian maupun aktivitas kehidupan sehari-hari. Lingkungan hidup yang jelek bisa menjadi faktor pembatas yang signifikan bagi pengembangan suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup dikategorikan menjadi dua, yakni lingkungan binaan dan lingkungan alami.

Pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Karo, khususnya lingkungan binaan perlu mendapat perhatian. Lingkungan binaan ini dapat berupa prasarana irigasi, bangunan-bangunan, jalan, pemukiman dan lain-lain. Penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memperhatikan lingkungan alam pada akhirnya akan memberikan akibat buruk bagi manusia. Secara umum binaan ini di Kabupaten Karo sudah cukup baik, meskipun terkadang terjadi kerusakan disebabkan lingkungan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan alami yang terjadi antara lain berupa pemanfaatan hutan secara keliru dan tidak berwawasan lingkungan seperti; perladangan berpindah-pindah, pembukaan ladang dengan membakar hutan, penebangan hutan secara ilegal dan aktivitas-aktivitas lain yang menyebabkan

kerusakan hutan dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan alami juga terkadang disebabkan oleh adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi areal-areal pemukiman, jalan, industri, pertanian/perkebunan dan sebagainya sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomiannya. Keinginan untuk mengeksploitir hutan sebanyak-banyaknya juga mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan.

4.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2001 berjumlah 287.457 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdapat pada Kecamatan Kabanjahe dengan jumlah penduduk 47.453 jiwa (16,47% dari total penduduk Kabupaten Karo), sedangkan jumlah penduduk tersebar diartikan pada Kecamatan Kufusunduk dengan jumlah penduduk 9.598 jiwa (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2001

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jawa)	Kepadatan (Jawa/Km ²)	Rasio (%)
1	Harau	267,31	1.391	5,1	1,76
2	Kabanjahe	22,24	47.453	2.134	7,43
3	Kabanjahe	16,91	2.275	134	0,47
4	Kabanjahe	218,28	1.240	5,7	2,03
5	Kabanjahe	176,7	1.391	7,9	2,83
6	Parigi	124	1.328	10,7	3,80
7	Sungai Pagar	221,47	1.391	6,3	2,26
8	Kabanjahe	144	17.253	120	4,28
9	Kabanjahe	20,3	1.311	64,6	22,84
10	Kabanjahe	20,3	1.311	64,6	22,84
11	Kabanjahe	20,3	1.311	64,6	22,84
12	Kabanjahe	120,4	1.311	10,9	3,87
13	Kabanjahe	120,4	1.311	10,9	3,87
Jumlah		2.127,35	77.284	36,3	12,84

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka Tahun 2001

BAB IV

SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN KARO

Aspek sosial yang akan dikaji meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, struktur penduduk, adat istiadat dan kelembagaan kemasyarakatan.

4.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2001 berjumlah 287.857 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Kabanjahe dengan jumlah penduduk 47.453 jiwa (16,49% dari total penduduk Kabupaten Karo), sedangkan jumlah penduduk terkecil ditemukan pada Kecamatan Kutabuluh dengan jumlah penduduk 9.598 jiwa (Tabel 8).

Tabel 8 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2001

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Rasio (%)
1	Mardingding	267,11	3.491	13.693	51	4,76
2	Laubaleng	252,6	3.763	14.472	57	5,03
3	Tigabinanga	160,38	5.194	17.035	106	5,92
4	Juhar	218,56	4.222	13.450	62	4,67
5	Munte	125,64	5.481	18.724	149	6,50
6	Kutabuluh	195,7	3.023	9.598	49	3,33
7	Payung	134	6.288	21.338	159	7,41
8	Simpang Empat	225,47	9.452	36.192	161	12,57
9	Kabanjahe	44,65	11.442	47.453	1.063	16,48
10	Berastagi	30,5	7.666	31.011	1.017	10,77
11	Tigapanah	219,09	8.077	29.493	135	10,25
12	Merek	125,51	3.638	14.729	117	5,12
13	Barusjahe	128,04	5.547	20.669	161	7,18
Jumlah		2.127,25	77.284	287.857	135	100,00

Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka, Tahun 2001

Tabel 9 dapat dilihat kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang negatif, khusus bagi Kecamatan Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga dan Kutabuluh. Selain itu terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi dalam periode yang sama terdapat pada Kecamatan Merek yaitu 3,20% kemudian diikuti oleh Kecamatan Barusjahe sebesar 2,26%.

Tabel 9 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kecamatan 1990 - 2000

No.	Kecamatan	1990	2000	2001	'90-'00	'00-'01
1	Mardinding	14.436	13.488	13.693	- 0,66	1,52
2	Laubaleng	15.293	14.268	14.472	- 0,67	1,43
3	Tigabinanga	16.969	16.795	17.035	- 0,10	1,43
4	Juhar	12.901	13.242	13.450	0,26	1,57
5	Munte	16.488	18.461	18.724	1,20	1,42
6	Kutabuluh	9.881	9.496	9.598	- 0,39	1,07
7	Payung	20.895	21.240	21.338	0,17	0,46
8	Simpang Empat	31.115	35.509	36.192	1,41	1,92
9	Kabanjahe	41.045	46.785	47.453	1,40	1,43
10	Berastagi	26.046	30.575	31.001	1,74	1,39
11	Tigapanah	25.731	28.956	29.493	1,25	1,85
12	Merek	10.731	14.521	14.729	3,53	1,43
13	Barusjahe	16.450	20.377	20.669	2,39	1,43
	Jumlah	257.981	283.713	287.857	1,00	1,46

Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka, Tahun 2001

Untuk periode tahun 1990-2001, laju pertumbuhan Kabupaten Karo sebesar 1,00%. Dalam periode ini terdapat 3 (tiga) kecamatan memiliki laju pertumbuhan yang negatif yaitu Kecamatan Mardinding, Laubaleng dan Kutabuluh. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1990 – 2001, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan.

Kategorisasi umur penduduk dibagi dalam kelompok balita (dibawah 5 tahun), kelompok remaja/tenaga muda yang tidak produktif, kelompok usia produktif (disebut dengan angkatan kerja) yaitu rentang umur 15 – 65 tahun, dan kelompok manula (manusia usia lanjut) yaitu usia 65 tahun ke atas.

Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif (penduduk berusia 0 – 14 tahun dan penduduk usia > 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Dalam hal ini semakin tinggi angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Tabel 10. menunjukkan angka beban ketergantungan untuk Kabupaten Karo dalam periode tahun 2001 sebesar yaitu 60.

Tabel 10 : Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan Tahun 2001

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kelompok Umur (jiwa)			Ratio Ketergantungan (%)
		(0 – 14)	(15 – 64)	> 65	
1.	Mardingding	5.088	8.221	394	67
2.	Laubaleng	4.989	8.867	616	63
3.	Tigabinanga	5.036	10.792	1.207	58
4.	Juhar	3.814	8.255	1.381	63
5.	Munte	6.067	11.493	1.154	63
6.	Kutabuluh	2.914	5.947	737	61
7.	Payung	6.689	13.182	1.467	62
8.	Simpang Empat	12.229	22.547	1.416	61
9.	Kabanjahe	15.865	30.680	1.321	57
10.	Berastagi	10.456	19.680	875	58
11.	Tigaparah	9.311	18.899	1.283	56
12.	Merek	5.336	8.882	511	66
13.	Barusjahe	6.548	13.156	965	57
Jumlah		94.342	180.178	13.337	60

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2001

Implikasi yang diberikan atas keadaan tersebut, potensi kelompok usia muda masih memerlukan perhatian besar untuk pengembangan kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil di masa mendatang. Selain itu juga menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk masih kuat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan sementara pencapaian usia harapan hidup masih relatif rendah.

Implikasi piramida penduduk dengan karakteristik yang diuraikan diatas, berarti perlu perhatian lebih besar dalam hal:

1. Penyediaan fasilitas umum (sekolah, umurn, olah raga, rekreasi, dll) bagi kelompok balita-anak-remaja.
2. Perlu disediakan fasilitas umum bagi golongan manula.
3. Akan terjadi ledakan penduduk menyangkut jumlah terbesar pada kelompok 10-14 tahun setelah 5-10 tahun. Kemudian akan menjadi kelompok produktif/menghasilkan keturunan.

4.1 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Aspek ketenagakerjaan yang disajikan meliputi: komposisi angkatan kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.

Di Kabupaten Karo penduduk berumur 10 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 219.433 orang (76,23%), diantaranya sebanyak 120.183 orang (54,77%) bekerja dan sisanya sebanyak 99.250 orang (39,34%) bekerja dengan status tidak terorganisir. Bila diperhatikan menurut tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja didominasi oleh kalangan pendidikan menengah ke bawah.

Jumlah penduduk yang bekerja pada usia 10 tahun ke atas (219.433) menurut lapangan usahanya adalah pertanian 145.813 orang (66,45%); penggalian 460 orang (0,21%); industri 1.755 orang (0,80%); listrik, gas dan air bersih 285 orang (0,13%), bangunan 6.670 orang (3,04%); perdagangan, hotel dan restoran 30.654 (13,97%); pengangkutan dan komunikasi 8.777 orang (4,00%); keuangan, asuransi dan usaha persewaan 768 orang (0,35%) dan jasa 23.128 orang (10,54%).

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 10 tahun ke atas ke dalam pasar kerja.

4.3 Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dirasakan sebagai salah satu beban pembangunan karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan perlu mendapat prioritas penting karena hal ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu daerah mencerminkan taraf intelektualitas daerah tersebut, di Kabupaten Karo tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas adalah tamat SD sebanyak 29,30%. Pada tahun 2001 bila dilihat dari proporsinya usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) sebanyak 36,82%, usia sekolah menengah tingkat pertama (13-15 tahun) sebanyak 18,09%, usia Sekolah Menengah Tingkat Atas (16-18 tahun) sebesar 16,78% dan usia Perguruan Tinggi (19-24 tahun) sebesar 28,31% dari jumlah usia sekolah 7 – 24 tahun di Kabupaten Karo (lihat Tabel 11).

Tabel 11 : Penduduk Kabupaten Karo Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2001

No.	Kecamatan	Kelompok Umur Sekolah			
		(7 – 12)	(13 – 15)	(16 – 18)	(19 – 24)
1	Mardingding	2.066	1.068	811	1.324
2	Laubaleng	2.129	1.065	852	1.249
3	Tigabinanga	2.066	1.131	885	1.397
4	Juhar	1.665	796	611	1.005
5	Munte	2.356	1.100	892	1.601
6	Kutzhuluh	1.186	589	440	905
7	Payung	2.722	1.313	1.054	1.854
8	Simpang Empat	4.540	2.203	2.206	3.760
9	Kabanjahe	6.139	3.179	3.621	5.156
10	Berastagi	4.109	1.910	1.947	3.522
11	Tigapanah	3.749	1.833	1.753	3.023
12	Merek	2.072	904	757	1.574
13	Barusjahe	2.454	1.216	1.151	2.275
Jumlah		37.253	18.307	16.980	28.645
Rasio (%)		36,82	18,09	16,78	28,31

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2001

4.4 Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Karo dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni beban tanggungan total, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan tingkat/distribusi pengeluaran. Secara terperinci hal-hal tersebut, diuraikan sebagai berikut : Struktur umur atau komposisi penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur.

Struktur umur penduduk di suatu daerah, rendahnya persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menyebabkan besarnya angka beban tanggungan total. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator beban ekonomi penduduk di suatu daerah. Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas yang sudah atau masih merupakan tenaga kerja. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk usia produktif meskipun sebagian diantaranya belum tentu bekerja.

Semakin tinggi penduduk usia produktif menyebabkan Angka Beban Tanggungan Total (ABTT) menjadi rendah yang berarti semakin sedikit penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Angka Beban Tanggungan Total Kabupaten Karo pada Tahun 2001 sebesar 60. Informasi penting mengenai perumahan antara lain: luas lantai, jenis dinding, sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum. Modus luas lantai rumah yang ditempati penduduk Kabupaten Karo berkisar antara 20-49 m² sebanyak 44,57%. Di lihat dari bahan untuk dinding, persentase rumah tangga yang mempunyai dinding terbuat dari papan/kayu lebih banyak jika dibandingkan: tembok, bambu atau lainnya yaitu sebesar 50,54%. Hal ini menyiratkan kondisi perumahan di Kabupaten Karo sudah cukup baik. Sementara itu jika diamati dari aspek penyediaan air minum ternyata 41,17% penduduk Kabupaten Karo menggunakan sumur.

4.5 Adat Istiadat

Penduduk Kabupaten Karo terdiri dari berbagai suku bangsa, mayoritas suku Karo, Jawa, Batak, Minang, dan Aceh. Suku lainnya adalah suku Nias dan Cina. Masing-masing suku mempunyai bahasa daerah, misalnya Bahasa Daerah Batak, Jawa, Karo dan lain-lain. Disamping itu setiap suku bersama bahasa daerahnya memiliki sistem kekerabatan/kekeluargaan dan adat istiadat tersendiri. Sebagian besar suku bangsa di Kabupaten Karo menganut sistem kekerabatan Matrilineal yang mendudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan terutama dalam hal adat-istiadat dan selama ini terdapat hubungan yang harmonis diantara suku.

Kelembagaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

Struktur organisasi instansi pemerintah/kelembagaan yang ada di Kabupaten Karo sejak era otonomi daerah per 1 Januari 2001 (UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) telah mengalami perubahan cukup besar, beberapa instansi digabung maupun berubah nama. Hal ini untuk mencapai efisiensi pemerintahan daerah dan sesuai tuntutan otonomi daerah dan kondisi tiap daerah.

Kelembagaan mempunyai peranan penting dalam penyusunan dan khususnya pelaksanaan tata ruang Kabupaten Karo. Peranan tersebut bukan hanya dalam pelaksanaan rencana tata ruang tetapi juga sebelum rencana tata ruang tersebut dihasilkan. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka instansi/kelembagaan yang ada di Kabupaten Karo mempunyai peranan pada bagian Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian dan Pembinaan.

Pada bagian perencanaan, dimulai dari proses penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Instansi yang mempunyai keterkaitan sehubungan dengan tugas dan fungsinya adalah Bapekab Karo dan Dinas Permukiman dan Dinas Prasarana Wilayah.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari proses pelaksanaan RTRWK Karo maka keterlibatan instansi-instansi terutama instansi-instansi yang terkait dengan keruangan seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain-lain diharapkan dapat memberikan informasi semaksimal mungkin menyangkut kondisi eksisting, potensi dan permasalahan serta sasaran dan rencana sebelum produk akhir RTRWK Karo dihasilkan.

Dari hasil pelaksanaan RTRWK Karo, sesuai dengan cakupan perencanaan tata ruang yaitu Perencanaan Struktural dan Pemanfaatan Ruang maka instansi yang sangat berkaitan dengan hasil penyusunan tersebut dan menyangkut pemanfaatan ruang penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam rencana tata ruang.

Partisipasi Masyarakat

Sehubungan dengan era otonomi daerah, dalam penyusunan RTRWK Karo sejak awal telah melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini semakin populer dan banyak digunakan dalam menetapkan perubahan kebijakan karena sekarang telah semakin disadari bahwa keterlibatan seluruh aktor atau *stake holder* dalam proses perumusan kebijakan merupakan hal yang paling esensial dalam merangkul komitmen publik untuk mengadakan perubahan. Masalah mencari pemecahan, bukan hanya persoalan melakukan intervensi kebijakan formal lewat mekanisme *pricing* dan regulasi tetapi juga bagaimana memperoleh konsensus yang dapat diterima semua pihak tentang keharusan menetapkan kebijakan yang terbaik atau perubahan 'perilaku' tertentu agar tidak terjadi kebijakan sepihak yang *counterproductive* dalam pelaksanaannya.

Dengan cara melibatkan seluruh kelompok yang berpengaruh (*stake holders*) dalam suatu forum, akan memungkinkan terjadinya proses diskusi kreatif, membagi informasi dan menemukan resolusi konflik. Dengan cara-cara diskusi kreatif seperti ini, walaupun harapan^o masing-masing kelompok dapat didengar, namun hasil

akhirnya sering kali berbeda dengan harapan awal individu maupun kelompok yang terlibat. Hal ini dapat dimengerti karena tanggung jawab dan kekuasaan yang sebenarnya tidak tercermin apa adanya dalam dinamika forum partisipatif.

Metode partisipatif penting sebagai kendaraan bersama untuk menampung pendapat dan melibatkan seluruh *stake holder* tetapi penggunaannya terbatas hanya untuk mendiskusikan masa depan dengan rentang jangka pendek atau menengah. Hal ini mengingat belum banyaknya pengalaman dan terbatasnya pengetahuan peserta forum, tentang perubahan yang bagaimana yang sangat diperlukan dalam menunjang masa depan pengembangan wilayah yang diinginkan. Bagaimanapun, metode ini masih bermanfaat.

Adalah lebih baik bila pelaksanaan forum partisipasi, perhatian difokuskan langsung kepada isu atau pertanyaan yang bersifat khusus daripada melangsungkan debat tentang masa depan sesuatu yang terlalu umum. Konsep dan mekanisme pelibatan *stake holder* (kalangan pemerintah, swasta, tokoh-tokoh masyarakat) masih perlu diperjelas sampai tingkat mana keterlibatan *stake holder* dapat menambah atau mengubah strategi kebijakan pembangunan.

Pandangan dan Sikap Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan, sifat dan watak serta tatanan hidup yang berlaku dalam masyarakat merupakan potensi yang perlu dipertimbangkan. Sikap dan watak masyarakat Kabupaten Karo tidak jauh berbeda dengan masyarakat suku Tapanuli lainnya, karena secara umum masyarakat Karo dan Toba berasal dari rumpun yang sama.

Beberapa ciri khas yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, seperti:

1. Agama dan adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dinamika dan mobilitas tinggi.
3. Demokratis, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4. Mudah diajak kerjasama
5. Keras tetapi terbuka dan menginginkan keterbukaan.

Tatanan

Memiliki adat-istiadat yang turun-temurun (tradisi) berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Demikian besarnya pengaruh adat-istiadat ini sehingga tokoh adat dapat berpengaruh pada kehidupan sosial, dan pendekatan secara adat selalu didahulukan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang timbul ditengah masyarakat, ataupun pada aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya.

Bila dilihat dari gaya hidup atau pola pikirnya, maka penduduk Kabupaten Karo termasuk kedalam kelompok yang cepat menerima inovasi baru sepanjang tidak bertentangan dengan adat, agama serta nilai-nilai yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Memiliki semangat yang tinggi untuk memajukan anak atau keturunan. Selain itu juga menganggap bahwa tanah merupakan pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai adat serta historis yang tinggi.

BAB V

PEREKONOMIAN KABUPATEN KARO

Pada dasarnya produk domestik daerah adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik wilayah meliputi wilayah-wilayah yang berada di dalam batas geografis daerah tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian dari kegiatan produksi yang dilakukan di suatu daerah namun beberapa faktor produksinya berasal/milik dari daerah lain dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu daerah bisa tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut.

Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antara daerah ini (termasuk juga dari/ke luar negeri) yang meliputi upah dan gaji, sewa, bunga, deviden dan keuntungan perusahaan perorangan, maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang betul-betul dimiliki penduduk di daerah tersebut.

Produk domestik regional sangat berhubungan dengan investasi. Semakin besar investasi maka akan semakin tinggi produk domestik regional, sebaliknya semakin kecil investasi, maka semakin rendah produk domestik regional. Dalam konsep ekonomi makro penimbunan/penumpukan modal (*capital accumulation*) selalu dianggap investasi. Investasi merupakan nilai semua penggunaan barang modal baru yang dapat menghasilkan suatu unit output dan berumur lebih dari satu tahun.

Sedangkan untuk barang/alat produksi yang berumur kurang dari satu tahun atau habis dipakai dalam proses produksi tidak digolongkan sebagai barang investasi. Adanya investasi yang tertanam di suatu daerah berarti memberikan harapan kepada pertumbuhan ekonomi.

Iklim investasi yang kondusif mendorong masuknya penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*). Kabupaten Karo memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah serta keadaan sosial, politik dan budaya yang relatif stabil, sehingga kepercayaan penanam modal semakin tumbuh dan hal ini akan mendukung proses pembangunan, khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Membaiknya perekonomian Kabupaten Karo tidak terlepas dari dukungan investasi yang tinggi.

5.1 Tinjauan Terhadap Perekonomian Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sepanjang tahun 1995 hingga tahun 1997 mengalami pertumbuhan yang relatif baik. Tahun 1995 laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7,06 % dan terus mengalami peningkatan di tahun 1996 menjadi 7,77 %. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, menjurus kepada krisis ekonomi yang lebih luas, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan. Keadaan ini juga berlangsung di Sumatera Utara di mana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan laju sekitar 5,33 %

Sebagai dampak dari krisis ekonomi tersebut, perkembangan produk domestik menjadi terhambat bahkan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selama tahun 1998 sebesar minus 12,77 persen di mana sektor-sektor ekonomi berada dalam menurun dan hanya beberapa sektor yang mengalami peningkatan, khususnya sektor pertanian.

Program *recovery* ekonomi yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil di tahun 1999 dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sekitar 0,68 %. Hal ini didukung oleh realisasi investasi pada berbagai sektor ekonomi yang

sebelumnya ditunda atau dibatalkan. Selain itu juga karena berangsur-angsur kondisi sosial politik secara nasional mengalami perbaikan.

Pergeseran struktur ekonomi Provinsi Sumatera Utara membawa dampak perubahan posisi masing-masing daerah terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 1993 kontribusi output Kabupaten Karo dalam pembentukan PDRB Sumatera Utara sekitar 2,65 %. Perubahan yang gradual dalam sektor-sektor ekonomi menyebabkan semakin besarnya peran sektor sekunder dan tersier serta menurunnya peran sektor primer dalam perekonomian. Kabupaten Karo dengan tumpuan output daerahnya pada sektor pertanian, sehingga kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Utara menjadi menurun. Tahun 1999 kontribusi Kabupaten Karo hanya sebesar 2,55 % dalam pembentukan PDRB Sumatera Utara, dan di tahun berikutnya menurun menjadi sekitar 2,54 %. Perkembangan terakhir bahkan menunjukkan kontribusi Kabupaten Karo hanya tinggal sekitar 2,45 %.

Berdasarkan harga konstan tahun 1993, pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo selama tahun 1995 hingga tahun 2000 tumbuh rata-rata sekitar 7,05 % per tahun masih di atas rata-rata Sumatera Utara yang tumbuh rata-rata hanya sekitar 3,39 % per tahun. Melalui Tabel 5.10 dapat dilihat pada tahun 2000 posisi Kabupaten Karo berada di urutan kesebelas dalam laju pertumbuhan PDRB.

Sebagai perbandingan pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo dapat dilihat pada beberapa daerah yang berada di sekelilingnya. Kabupaten Dairi tumbuh lebih lambat dengan laju sekitar 4,16 % demikian pula dengan Kabupaten Langkat yang tumbuh hanya sekitar 2,57 persen selama tahun 2000. Kabupaten Deli Serdang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten Karo dengan laju sekitar 2,57 %.

Melalui perencanaan yang tepat terhadap tata ruang wilayah ekonomi Kabupaten Karo, akan dapat ditingkatkan pertumbuhan PDRBnya sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Selama tahun 1993 hingga tahun 2001 faktor-faktor eksternal banyak mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Karo terutama sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Perkembangan pariwisata nasional mendorong pertumbuhan sektor hotel dan restoran demikian pula dengan industri kecil kerajinan.

Secara lokasional sektor pertanian, khususnya tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat dan peternakan tumbuh relatif cepat. Sektor tersebut memiliki keuntungan lokasional seperti sumberdaya yang melimpah dan pemanfaatan yang efisien. Demikian pula dengan sub-sektor jasa lembaga keuangan bukan bank dan jasa penunjang keuangan tumbuh seiring dengan kebutuhan modal dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 – 2000 (%)

No.	Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	<u>Kabupaten</u>						
1	Nias	10,64	7,25	4,61	-6,20	3,17	3,00
2	Tapanuli Selatan	11,75	8,24	5,63	-5,83	1,83	3,15
3	Mandailing Natal	-	-	-	-5,83	1,65	3,22
4	Tapanulu Tengah	9,64	11,18	5,73	-8,26	3,43	3,46
5	Tapanuli Utara	7,21	8,18	6,36	-5,64	2,43	4,63
6	Toba Samosir	-	-	-	-4,67	2,68	-7,29
7	Labuhan Batu	9,24	12,28	9,96	1,20	4,98	6,49
8	Asahan	9,98	10,29	8,81	1,05	5,29	6,54
9	Simalungun	8,49	5,85	4,90	-2,76	4,85	3,95
10	Dairi	8,70	10,85	6,61	2,45	3,60	4,16
11	Karo	12,49	9,50	7,55	0,72	5,71	5,35
12	Deli Serdang	15,36	6,55	9,49	-8,70	3,26	5,83
13	Langkat	9,21	7,13	-7,13	-1,22	0,56	2,57
	<u>Kota</u>						
14	Sibolga	18,46	18,30	5,96	-8,37	5,19	5,26
15	Tj. Balai	9,04	9,76	7,52	-7,45	2,57	3,72
16	Pematang Siantar	6,42	5,22	6,15	-4,71	3,84	5,15
17	Tebing Tinggi	11,14	7,02	3,86	-15,54	2,90	2,97
18	Medan	6,53	9,75	7,73	-18,11	3,43	4,95
19	Binjai	9,61	9,82	2,59	-12,76	4,44	6,80
	Sumatera Utara	9,09	9,09	9,01	5,70	-10,90	2,59

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2000

5.2 Struktur PDRB Kabupaten Karo

Pola pertumbuhan sektor-sektor ekonomi perlu diperhatikan dalam pembangunan untuk menjaga agar pembangunan ekonomi tersebut tidak menghadapi hambatan dalam hal memperoleh bahan baku, sumberdaya manusia, energi dan fasilitas-fasilitas untuk mendistribusikan hasil produksi ke pasar selain itu perlu dihindari hambatan memperoleh pasaran untuk barang dan jasa yang telah dan akan dihasilkan.

Dengan demikian dalam pembentukan struktur ekonomi wilayah, perlu diperhatikan penyebaran sumber daya alam, kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi dan biaya pengangkutan, serta biaya komunikasi yang kesemuanya memperhitungkan unsur-unsur tata ruang terutama lokasi. Penyebaran sektor-sektor pembangunan yang tersusun dalam suatu pola tata ruang yang baik akan memberikan pendapatan yang tinggi daerah tersebut, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses ini mengandung unsur dinamis, dan bukan hanya output yang diperhitungkan namun juga pertumbuhan jumlah penduduknya. Laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini semua barang dan jasa dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor sesuai dengan tahun yang berjalan.

Penyajian data-data secara runtun waktu, perkembangan pendapatan regional dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah karena meningkatnya produksi dan harga yang berarti masih dipengaruhi oleh faktor inflasi dan deflasi. Angka DPRB secara absolut memberikan gambaran besarnya tingkat produksi suatu wilayah. Perkembangan PDRB Kabupaten Karo dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 cukup meningkat.

Angka-angka pendapatan regional menggambarkan adanya kenaikan ataupun penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan riil yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, bila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat dan kenaikan/penurunan pendapatan disebabkan adanya perubahan harga. Kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan karena adanya inflasi (menurunnya nilai uang) atau melemahkan daya beli penduduk. Oleh karena itu untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya (riil) di mana faktor inflasi sudah terlebih dahulu dikeluarkan.

Tahun 1993 peran sektor pertanian mendominasi lapangan usaha yang ada di Kabupaten Karo, diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Setelah pembangunan berjalan selama 4 tahun, posisi sektor pertanian semakin besar kuat dengan kontribusinya sekitar 64,03 %, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya menurun hingga hanya sekitar 9,83 %. Sektor industri walaupun memberikan kontribusi yang relatif kecil, namun terus mengalami peningkatan yang berarti.

Di tahun 2001 peranan sektor pertanian meningkat menjadi 66,26 % dari pembentukan PDRB Kabupaten Karo. Hasil ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan produksi pertanian, karena sesuai kondisi geografinya dan masyarakat setempat. Sektor industri juga terus mengalami peningkatan dalam pembentukan PDRB, namun masih relatif kecil. Posisi sektor jasa-jasa digeser oleh sektor perdagangan hotel dan restoran yang menduduki peringkat kedua dengan kontribusi sekitar 12,90 % sedangkan jasa-jasa turun menjadi 10,05 %. Perincian mengenai kontribusi PDRB Kabupaten Karo menurut lapangan usaha periode 1993 – 2001 seperti diperlihatkan pada Tabel 13.

Tabel 13 : Persentase PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku 1993 – 2001 (%)

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		1993	1997	2001*
1	Pertanian	61.01	64.03	66.26
2	Penggalian	0.02	0.41	0.30
3	Industri	1.28	1.56	1.63
4	Listrik, Gas, Air minum	0.50	0.46	0.39
5	Bangunan	2.55	2.48	2.21
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.39	9.83	12.90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6.86	5.64	3.97
8	Bank dan Lembaga Keuangan	2.98	3.13	2.39
9	Jasa	14.41	12.46	10.05
PDRB Kabupaten Karo		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Karo

Keterangan : * = Angka Sementara

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo selama tahun 1993 hingga tahun 1997 relatif tinggi dengan rata-rata sekitar 10,70 % per tahun. Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, PDRB Kabupaten Karo mengalami pertumbuhan yang lambat dan rata-rata hanya mencapai sekitar 3,94 %. Kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di Sumatera Utara, karena di Kabupaten Karo sekitar 66,26 persen PDRBnya dari sektor pertanian, terutama bahan makanan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dilihat secara sektoral, sektor pertanian memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi selama periode tahun 1993 hingga tahun 2001. Demikian pula dengan sektor penggalian, industri, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bank dan lembaga keuangan. Sektor bangunan selama periode tahun 1993 hingga 1997 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan PDRB rata-rata, namun pada periode 1997 hingga 2001

mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor pengangkutan dan komunikasi rata-rata tumbuh lebih lambat dibanding rata-rata selama dua periode tersebut.

Tabel 14 : Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)	
		1993-1997	1997-2001
1	Pertanian	11,63	4,45
2	Penggalian	62,98	5,71
3	Industri	15,40	5,34
4	Listrik, Gas, Air minum	8,39	7,08
5	Bangunan	11,61	- 3,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,60	11,52
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,20	2,84
8	Bank dan Lembaga Keuangan	12,27	6,17
9	Jasa	6,35	- 6,54
PDRB		10,70	3,94

Sumber : Kabupaten Karo dalam Angka 2000, BPS Karo

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada prinsipnya mengandung dua unsur utama, yaitu terjadinya perubahan secara terus menerus dalam struktur ekonomi dan adanya usaha menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Pada bagian terdahulu telah diuraikan perubahan ekonomi secara struktural dengan naiknya peran sektor perdagangan hotel dan restoran menggantikan posisi sektor jasa pada urutan kedua setelah pertanian.

Secara umum PDRB per kapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dan juga untuk meentukan pertumbuhan ekonominya. Perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam pembangunan wilayah mendorong terjadinya peningkatan pendapatan per kapita wilayah.

Tabel 15 : Perkembangan Pertumbuhan PDRB PER Kapita Kabupaten Karo Tahun 1995 – 2000

Tahun	ADH Berlaku (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	ADH Konstan 1993 (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1995	2.403.389	-	2.288.469	-
1996	2.629.934	9,43	2.443.365	6,77
1997	3.045.668	15,81	2.617.079	7,11
1998	4.689.052	53,96	2.601.016	- 0,61
1999	5.700.145	21,56	2.714.383	4,36
2000	6.193.517	8,66	2.907.053	7,10
2001	6.671.418	7,72	2.950.570	1,50

Sumber : BPS Sumatera Utara 2000 Diolah

Melalui Tabel 15 dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Karo tahun 1995 hingga tahun 2001 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 1993. PDRB per kapita wilayah menunjukkan peningkatan dari tahun 1995 hingga tahun 2001 atas dasar harga berlaku, di mana pada saat puncak krisis ekonomi tumbuh hingga 53,96 %. Atas dasar harga berlaku tidak menggambarkan keadaan pendapatan riil masyarakat karena unsur inflasi atau harga-harga sangat berpengaruh, terutama di tahun 1998 harga-harga melambung tinggi.

Secara riil perkembangan pendapatan per kapita masyarakat dapat dilihat atas dasar harga konstan. Tahun 1995 hingga tahun 1997 terjadi peningkatan PDRB per kapita dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun penurunan yang tajam terjadi seiring dengan krisis yang terjadi di tahun 1998 dengan laju pertumbuhan minus 0,61 %. Selanjutnya mulai tahun 1999 PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Karo kembali mengalami peningkatan.

5.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan pemahaman yang sejalan dengan pengertian umum maka potensi pendapatan yang

paling besar dan lestari sebenarnya bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah.

Tabel 16 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Proporsi (%)
1996/1997	3.704.729.000	3.532.014.428	95,34
1997/1998	4.620.206.000	3.891.481.000	84,23
1998/1999	3.508.716.700	3.784.704.000	107,87
1999/2000	-	3.566.021.000	-

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karo, 2000

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun yang berasal dari berbagai sumber penerimaan kecuali pada tahun 1998/1999. Dari data 1998/1999 di atas menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Karo dalam membiayai pembangunan di daerah ini mengalami penurunan sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi. Potensi untuk menaikkan PAD sesungguhnya masih cukup besar karena itu dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Tabel 17 : Perbandingan PAD Dengan Kabupaten Terdekat (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/ Kota	PAD	Penerimaan	Pengeluaran	Rasio PAD Terhadap	
				Penerimaan	Pengeluaran
Karo	3.566.021	57.352.364	45.495.315	5,29	7,84
Dairi	1.018.073	62.877.631	38.571.228	1,62	2,64
Deli Serdang	10.841.985	212.391.678	153.593.970	5,10	7,06
Langkat	4.109.503	125.530.326	89.982.292	3,27	4,57
Simalungun	5.012.052	145.036.884	111.734.742	3,46	4,49
P. Siantar	5.520.297	42.169.202	31.934.801	13,09	17,29

Sumber : Data Keuangan BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2000/ Diolah

Dari Tabel 17 dapat dilihat tingkat kemandirian masing-masing daerah dalam membiayai pengeluarannya dengan pendapatan asli daerahnya. Walaupun Kabupaten Deli Serdang memperoleh PAD lebih tinggi dari Kabupaten Karo, namun PAD

tersebut hanya sekitar 5,10% dari penerimaannya. Kabupaten Karo berada di bawah Kota Pematang Siantar dalam kemandirian pembiayaan pengeluaran dengan PAD dan lebih baik dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan yang terarah dan terpadu. Mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk itu diperlukan agar pembangunan daerah tersebut secara berdayaguna dan berhasil guna di setiap kawasan, serta langkah administrasi pada Pemerintah Kabupaten tersebut.

Proses pembangunan dan investasi yang berkembang di masyarakat sangat dipengaruhi berbagai kebutuhan hidup yang mencakup perubahan-perubahan tingkat harga, baik sebagai harga barang, harga produksi, harga ekspor atau konsumsi masyarakat yang lain. Swastanya harga-harga masyarakat baik yang diadukan untuk perbaikan soal produksi, pemasaran, distribusi daya hasil (energi) baik dari segi nilai-perbaikan ke-ekonomian lain.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Karo khususnya lingkungan bahan perlu mendapat perhatian. Lingkungan bahan ini dapat berupa sumber daya, bangunan-bangunan, jalan, pemukiman dan lain-lain. Penghasilan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memperhatikan lingkungan akan pada akhirnya akan memberikan akibat buruk bagi manusia. Sejalan dengan itu di Kabupaten Karo telah dapat baik, meskipun menghadapi target kerangka pembangunan lima tahun. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan alam yang sangat nyata dan berupa penebangan hutan secara liar dan alat transportasi lingkungan seperti pembangunan terpadu-pada, perubahan lingkungan dengan pembekalan hutan, pembekalan alam secara luas dan aktivitas-aktivitas lain yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan. Penebangan liar dan lingkungan alam yang terdapat disebabkan oleh adanya nilai harga kayu yang tinggi, dengan adanya pembekalan jalan, industri, pertambangan dan sebagainya sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonominya. Kerusakan alam

BAB V

KESIMPULAN

Pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan yang serasi dan terpadu. Mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk itu diarahkan agar pembangunan daerah langsung secara berdayaguna dan berhasil guna di setiap kawasan, serta tingkatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten termasuk kecamatan.

Proses pembangunan dan dinamika yang berkembang di masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup telah memaksa perubahan penggunaan fungsi hutan, baik sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan cagar alam kedalam penggunaan yang lain. Perambahan hutan oleh masyarakat baik yang ditujukan untuk perluasan areal produksi, pemenuhan kebutuhan kayu bakar (energi) telah ikut serta mempengaruhi keseimbangan hutan.

Pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Karo, khususnya lingkungan binaan perlu mendapat perhatian. Lingkungan binaan ini dapat berupa prasarana irigasi, bangunan-bangunan, jalan, pemukiman dan lain-lain. Penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memperhatikan lingkungan alam pada akhirnya akan memberikan akibat buruk bagi manusia. Secara umum binaan ini di Kabupaten Karo sudah cukup baik, meskipun terkadang terjadi kerusakan disebabkan lingkungan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan alami yang terjadi antara lain berupa pemanfaatan hutan secara keliru dan tidak berwawasan lingkungan seperti; perladangan berpindah-pindah, pembukaan ladang dengan membakar hutan, penebangan hutan secara ilegal dan aktivitas-aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan alami juga terkadang disebabkan oleh adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan, industri, pertanian/perkebunan dan sebagainya sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomiannya. Keinginan untuk

mengeksploitir hutan sebanyak-banyaknya juga mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan.

Implikasi yang diberikan atas keadaan tersebut, potensi kelompok usia muda masih memerlukan perhatian besar untuk pengembangan kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil di masa mendatang. Selain itu juga menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk masih kuat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan sementara pencapaian usia harapan hidup masih relatif rendah.

Rendahnya persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menyebabkan besarnya angka beban tanggungan total. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator beban ekonomi penduduk di suatu daerah. Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas yang sudah atau masih merupakan tenaga kerja. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk usia produktif meskipun sebagian diantaranya belum tentu bekerja. Semakin tinggi penduduk usia produktif menyebabkan Angka Beban Tanggungan Total (ABTT) menjadi rendah yang berarti semakin sedikit penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Sehubungan dengan era otonomi daerah, dalam penyusunan RTRWK Karo sejak awal telah melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini semakin populer dan banyak digunakan dalam menetapkan perubahan kebijakan karena sekarang telah semakin disadari bahwa keterlibatan seluruh aktor atau *stake holder* dalam proses perumusan kebijakan merupakan hal yang paling esensial dalam merangkul komitmen publik untuk mengadakan perubahan. Masalah mencari pemecahan, bukan hanya persoalan melakukan intervensi kebijakan formal lewat mekanisme *pricing* dan regulasi tetapi juga bagaimana memperoleh konsensus yang dapat diterima semua pihak tentang keharusan menetapkan kebijakan yang terbaik atau perubahan 'perilaku' tertentu agar tidak terjadi kebijakan sepihak yang *counterproductive* dalam pelaksanaannya.

Penduduk Kabupaten Karo termasuk kedalam kelompok yang cepat menerima inovasi baru sepanjang tidak bertentangan dengan adat, agama serta nilai-nilai yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Memiliki semangat yang tinggi untuk memajukan anak atau keturunan. Selain itu juga menganggap bahwa tanah merupakan pusaka yang diwariskan secara turunt-temurun dan memiliki nilai adat serta historis yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, dkk, 1980. *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIS, Jakarta.
- Alfitri, 1993. *Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal Dalam Pembangunan*, Tesis Magister, PPS-UGM, Yogyakarta.
- Arief, Sritua, 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1995. *Ekonomi Pembangunan*, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Bryant, Coralie dan Louise White, 1982. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Darus, Bahauddin, 1997. *Pembangunan Desa Pantai Dalam Garis-garis Besar: Haluan Negara (GBHN)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Agribisnis, Fakultas Ekonomi USU.
- Dirjen PMD Depdagri, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*.
- Ginting, Meneth, 1990. *Idaman dan Harapan Masyarakat Karo*, USU Press, Medan.
- Hadjisaroso, 1994. "Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Di Indonesia" dalam *Prisma* No. 8 Agustus, Jakarta.
- Hanafiah. T, 1982. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian-IPB, Bogor.
- Haq, Mahbub, 1983. *Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Inayatullah, 1997. "Rural Organization and Rural Development, Some ASIAN Experince", dalam Mubyarto dkk, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Ismawan, Bambang dan Kartjono, 1992. "Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Menciptakan Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan, dalam Mubyarto (Ed) *Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta.
- Jayadinata, Johara T, 1992. *Tataguna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung.

- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono, 1987. *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dan Perkembangan Masyarakat Indonesia*, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta.
- Raharjo, Dawam M., 1992. "Keswadayaan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi" dalam *Pengembangan Swadaya Nasional : Tinjauan Ke Arah Persepsi Yang Utuh*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sandy, IMade. 1982. *Pembangunan Wilayah*, Monograf, Bogor.
- Saptarini, Dian, et.al, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Jakarta.
- Soedjito, 1987. *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Bayu Grafika, Yogyakarta.
- Soehardi, 1985. "Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai" dalam *Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Soetrisno, L., 1991. *Proses Melemahnya Demokratisasi Pedesaan dan Kemandirian Masyarakat Desa Di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pembangunan dan Kemandirian Masyarakat Desa, PAU Studi Sosial Budaya UGM, Yogyakarta.
- Subhilhar, 1996. "Pembangunan Daerah, Sentralisasi dan Desentralisasi" dalam *Wawasan* No. 4, Januari.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Suparmoko, 1987. *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Makalah Seminar P3PK-UGM, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Ke-3, Erlangga, Jakarta.